

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sudah dilakukan, tetapi belum optimal. Pemilik IUP yaitu CV Putra WD selalu mendapat pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Pengawasan tersebut didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan Polsek Kecamatan Kemalang. DLH Kabupaten Klaten sudah melakukan kegiatan pencegahan ataupun penanggulangan kerusakan lingkungan, hanya saja, kegiatan reklamasi pasca tambang sebagai bagian dari kegiatan pemulihan lingkungan belum dilakukan.
2. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan tsebagai akibat penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan disebabkan oleh adanya kendala yang berupa adanya situasi dilematis yang dihadapi DLH terkait

keberadaan pertambangan serta keterbatasan SDM DLH yang mempengaruhi intensitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan perlu melakukan pengawasan secara rutin dan intensif terhadap kegiatan pertambangan di Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, serta bertindak lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha tambang CV Putra WD.
2. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mengatur bahwa wilayah Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten bukan merupakan wilayah pertambangan, maka Pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten agar sesuai dengan peraturan yang baru.
3. Pelaku usaha CV Putra WD dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir perlu lebih memerhatikan dampak penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir dengan memerhatikan ketentuan teknis dan tata cara yang baik pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim, 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Penerbit Nulis Media, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Penerbit Gramata Publishing, Bekasi.
- Heinz Frick, 1990, *Peralatan Pembangunan Kontruksi Dan Pemeliharaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyronimus Rhati, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sukandarrumidi dkk, 2014, *Geologi Umum*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 Tentang Operator Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal:

Nizlawati MS, 2015, “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas Di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-3.

Hasil Penelitian:

Eva Haryani, 2016, *Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup Di Lingkungan III Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015*, Skripsi, Universitas Lampung.

Muhsah Ahmadi dkk, 2003, *Kajian Daya Dukung Lingkungan Geologi untuk Penataan Lahan Penambangan Pasir Vulkanik di Sungai Woro Klaten Jawa Tengah*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada.

Internet:

Dinas Lingkungan Hidup, “Giat DLH”, dalam <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-36>, diakses 13 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Pengendalian”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengendalian>, diakses 6 September 2019.

Wikipedia, “Alat Berat”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Alatberat>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, Jam 12.08 WIB.

Dinas lingkungan Hidup, 2019, <https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/>, pada tanggal 25 Oktober 2019.

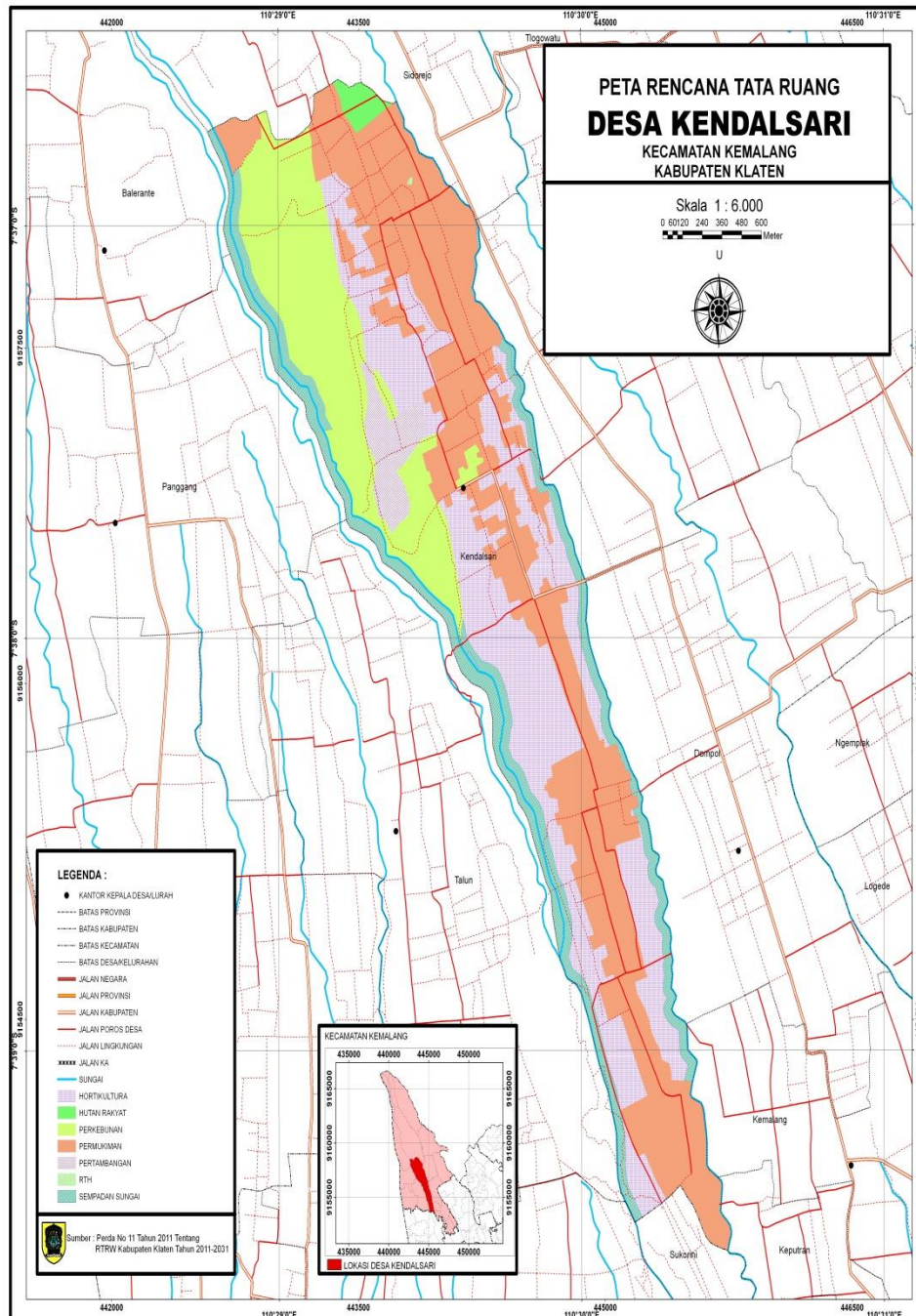
Badan pusat statistik, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, pada tanggal 25 Oktober 2019.

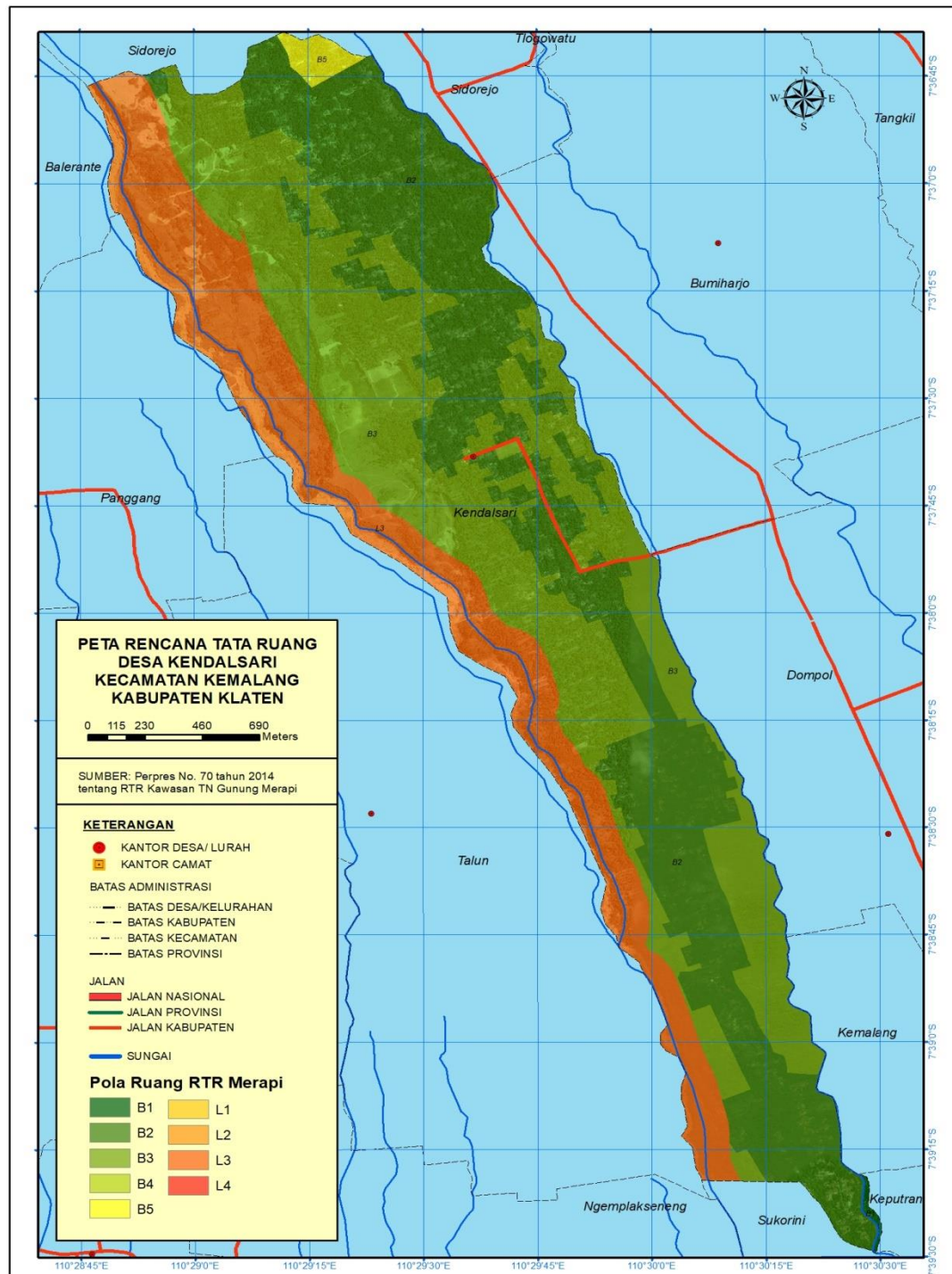
<https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2019/01/25/316/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kabupaten-klaten-tahun-1986---2017.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/79141-ID-pengaruh-penambangan-pasir-dan-batu-terh.pdf>, di akses pada tanggal 16 November 2019.

<https://www.solopos.com/pendapatan-klaten-pajak-dan-harga-pasir-njomplang-pemkab-klaten-akan-evaluasi-tarif-pajak-penambangan-681266>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

Lampiran 1 Peta Wilayah Pertambangan





Lampiran 2 Foto Kegiatan Tambang

